



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARWA PRAMANA**
2. Jabatan : **KALAKHAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
3. NHK : **105408**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 696.890.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/80 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 221.840.000
2. Tanah Seluas 132 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 207.636.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/105 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 267.414.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 571.714.634**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
7. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
8. MOBIL, SUZUKI IGNIS/MNPM MINIBUS Tahun 2018, HASIL



SENDIRI	Rp. 180.214.634		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	11.650.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	82.018.807
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.362.273.441
III. HUTANG		Rp.	306.342.111
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.055.931.330

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Maret 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.